

**ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR
PENDIDIKAN, KESEHATAN, DAN INFRASTRUKTUR TERHADAP
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Endah Susanti¹

Nur Hidayat²

ABSTRACT

This study aims to examine the Effect of Government Expenditur in Educattion sectore, Health sectore, and Infrastructure sector against Human Develompent Index (HDI) in East Kalimantan Province during period 2010-2019.

This research is a quantitative research to analyze the direct effect of some independent variables and on the dependent variable by using multiple linier regression methode

The results of this analysis indicate that government spending education sector (X1) has no significantly affects the Human Development Index (Y) in East Kalimantan Province. Government spending health sector (X2) has significantly affects on the Human Development index (Y) in East Kalimantan Province. Government spending infrastructure sector (X3) has no significantly affects on the Human Development index (Y) in East Kalimantan Province.

Keywords: Government Spending Education Sector, Government Spending Health Sector, Government Spending Education Sector, Government Spending Infrastructure Sector, Human Development Index (HDI).

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi awalnya memandang bahwa keberhasilan pembangunansuatu wilayah berdasarkan pada pertumbuhan ekonomi semata tanpa melihat aspek yang lain seperti kemiskinan, pengangguran dan disparitas pendapatan, maka diperlukan alat yang menyeluruh mengukur keberhasilan pembangunan suatu wilayah melalui pendekatan kesejahteraan masyarakat, yaitu melalui indeks pembangunan manusia.

Pembangunan manusia merupakan proses untuk memperbanyak pilihan pilihan yang dimiliki oleh manusia. Diantara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak. United Nations Development Programme (UNDP) melalui *Human Development Report* dalam publikasinya menyatakan pembangunan manusia sebagai “a process of enlarging people’s choices”

atau suatu proses yang meningkatkan aspek kehidupan masyarakat.

Perkembangan angka IPM di Kalimantan Timur terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, IPM Kalimantan Timur tercatat sebesar 76,61 dan termasuk ke dalam kategori tinggi bersama 2 provinsi lainnya yaitu DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Angka IPM 2019 ini meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 75,83, atau naik sebesar 0,78 persen.

Pada tahun 2018, aspek kesehatan penduduk, yang ditunjukkan oleh indikator angka harapan hidup, mencapai usia 73,96 tahun. Variabel pendidikan yang diwakili oleh indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah juga mengalami peningkatan. Angka harapan lama sekolah tercatat sebesar 13,67 tahun, lebih tinggi dibandingkan angka tahun 2017 yaitu 13,49 tahun. Peningkatan juga terlihat pada indikator pendidikan lainnya, yaitu rata-rata lama sekolah, dari 9,36 tahun pada tahun 2017, meningkat menjadi 9,48 tahun pada 2018. Aspek ekonomi masyarakat diukur dengan indikator pengeluaran per kapita. Tahun 2018, pengeluaran per kapita Kalimantan Timur sebesar 11,9 juta rupiah/tahun, di mana angka tersebut lebih besar dibandingkan tahun 2017, yaitu sebesar 11,6 juta rupiah pertahun.

Kalimantan Timur merupakan penyumbang hampir 50 persen perekonomian di Pulau Kalimantan.

Meskipun demikian pertumbuhan ekonomi tidak sejalan dengan pemerataan pembangunan yang ada di kabupaten. Terlihat dari masih banyak daerah tertinggal di Provinsi Kalimantan Timur yang sulit untuk akses masuk ke daerah tersebut. Sulitnya akses masuk ke daerah dapat menyebabkan mobilitas barang dan jasa di daerah tersebut terhambat, sehingga akan membuat daerah tersebut semakin tertinggal.

(Ala, 2016) menemukan bahwa infrastruktur merupakan faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas. Infrastruktur merupakan salah satu kunci guna meningkatkan IPM di suatu wilayah.

TINJAUAN PUSTAKA

Ekonomi Pembangunan

Ekonomi pembangunan adalah suatu bidang studi dalam ilmu ekonomi yang mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi di negara-negara berkembang, dan kebijakan-kebijakan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi.

Pembangunan secara tradisional diartikan sebagai kapasitas dari sebuah perekonomian nasional yang kondisi-kondisi ekonomi awalnya kurang lebih bersifat statis dalam kurun waktu cukup lama untuk menciptakan dan mempertahankan kenaikan tahunan atas pendapatan nasional bruto (Todaro, 2000).

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia merupakan indeks komposit untuk mengukur sejauh mana kesejahteraan dalam pembangunan masyarakat bisa tercapai. (UNDP)

Paradigma pembangunan yang sedang berkembang saat ini adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan pembangunan manusia yang dilihat dengan tingkat kualitas hidup manusia di tiap-tiap negara. Salah satu tolok ukur yang digunakan dalam melihat kualitas hidup manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diukur melalui kualitas tingkat pendidikan, kesehatan dan ekonomi (daya beli). Melalui peningkatan ketiga indikator tersebut diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas hidup manusia. (Mirza, 2012).

Metode Perhitungan Indeks Pembangunan Manusia

Paradigma pembangunan menempatkan manusia sebagai fokus dan sasaran akhir dari pembangunan, yaitu tercapainya penguasaan atas sumber daya, peningkatan pendidikan dan peningkatan derajat kesehatan. Rumus perhitungan Indeks Pembangunan Manusia menurut BPS, (2020) yaitu sebagai berikut:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$$

Dimana :

X (1): Indeks harapan hidup

X (2): Indeks pendidikan =
2/3 (indeks melek

huruf) + 1/3

(indeks rata-rata)

X (3): Indeks standar hidup layak

Masing-masing indeks komponen IPM tersebut merupakan perbandingan antara selisih nilai suatu indikator dan nilai minimumnya dengan selisih nilai maksimum dan nilai minimum indikator yang bersangkutan. Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks } X(i) = \frac{(X(i) - X(i)_{\min})}{(X(i)_{\max} - X(i)_{\min})}$$

Dimana:

X (i) :

Indikator ke-i (i = 1, 2, 3)

X (i) maks :

Nilai maksimum X (i)

X (i) min :

Nilai minimum X (i)

Pengeluaran Pemerintah

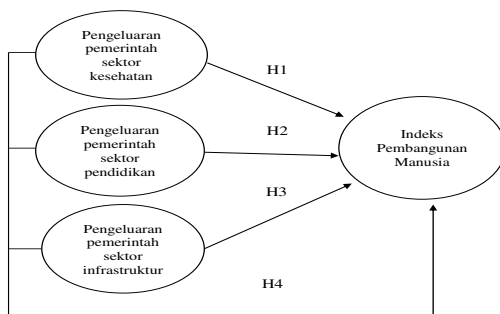
Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen kebijaksanaan fiskal yang terutama bertujuan untuk mencapai kestabilan ekonomi yang mantap dengan tetap mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi. Jika dilihat dari perkembangan kegiatan pemerintah dari tahun ke tahun, terlihat bahwa peranan pemerintah selalu meningkat hampir di segala bidang ekonomi.

(IPM) dapat diwujudkan melalui realisasi belanja negara dalam pelayanan publik. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang diperkuat oleh UU No. 23 Tahun 2014, belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan

meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan jaminan sosial dengan mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolak ukur kinerja dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Kuncoro, 2013).

Kerangka Pikir

Disusun kerangka pikir penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran
Sumber: Penulis, 2020

METODE PENELITIAN

Alat Analisis dan Pengujian Hipotesis

Untuk melakukan pengujian hipotesis dan memperoleh gambaran tentang Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Timur.

Alat analisis yang digunakan model regresi linear berganda memiliki variabel penduga lebih dari satu, yaitu X_1 sampai dengan X_3 . Maka variabel dependen yang dipengaruhi variabel independen dinyatakan dalam variabel:

$$Y = f(X_1, X_2, X_3)$$

Y = Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

X_1 = Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan

X_2 = Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan α = Konstanta

$\beta_1 - \beta_2$ = Koefisien Regresi Variabel Independen

ϵ = Error term Variabel pengganggu atau faktor-faktor di luar variabel yang tidak dimasukkan sebagai variabel model di atas (kesalahan residual).

Kemudian ditransformasikan kedalam model regresi linier sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 (X_1) + \beta_2 (X_2) + \beta_3 (X_3) + \epsilon$$

Untuk menguji hipotesis penelitian menggunakan Uji Regresi, uji Korelasi (R), uji R^2 , Uji Asumsi klasik, uji F (uji serentak) dan uji t (uji parsial), untuk mengetahui besaran pengaruh antara variabel bebas dengan variabel tidak bebas.

ANALISIS

Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Berdasarkan hasil regresi yang telah dihitung dengan menggunakan SPSS Versi 20 maka ditemukan pengaruh masing-masing variabel independen yang terdiri dari Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (X_1), Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan (X_2), dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Infrastruktur (X_3), terhadap IPM (Y) dapat dijelaskan seperti berikut: Pada fungsi variabel eksogen = X_1, X_2, X_3 , dan variabel endogen Y dapat diketahui persamaan sebagai berikut:

$$Y = 0,013 X_1 + 0,054 X_2 - 0,011 X_3$$

- Berdasarkan model persamaan yang telah dihasilkan diatas, selanjutnya dapat diinterpretasikan sebagai berikut:
- Koefisien Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (X_1) sebesar 0,013, artinya jika variabel eksogen lainnya bernilai tetap dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (X_1) mengalami kenaikan sebesar 1%, maka IPM (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,013%. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan terhadap IPM, di mana

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2.760	.471		5.863	.001
Ln_X1	.013	.008	.374	1.620	.156
Ln_X2	.054	.020	.611	2.691	.036
Ln_X3	-.011	.011	-.180	-.987	.362

semakin naik Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan maka akan semakin meningkatkan IPM Kalimantan Timur.

- Koefisien Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan (X_2) sebesar 0,054, artinya jika variabel eksogen lainnya bernilai tetap dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan (X_2) mengalami kenaikan sebesar 1%, maka IPM (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,054%. Koefisien bernilai

positif artinya terjadi hubungan positif antara Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan terhadap IPM, di mana semakin naik nilai Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan maka akan semakin meningkatkan IPM Kalimantan Timur.

Koefisien Pengeluaran Pemerintah Sektor Infrastruktur (X_3) sebesar -0,011, artinya jika variabel eksogen lainnya bernilai tetap dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Infrastruktur (X_3) mengalami kenaikan 1%, maka IPM (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,011 %. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan negatif antara Pengeluaran Pemerintah Sektor Infrastruktur terhadap IPM dimana semakin naik nilai Pengeluaran Pemerintah Sektor Infrastruktur maka akan semakin menurun pula IPM Kalimantan Timur.

Uji t (Uji Secara Parsial)

Pengujian ini untuk mengetahui adanya pengaruh variabel eksogen = X_1 , X_2 , X_3 terhadap variabel endogen dengan hasil pengujian secara parsial sebagai berikut:

Tabel Hasil Analisis Uji t

a. Dependent Variable: Ln_Y

Untuk melihat pengaruh variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (X_1), pengeluaran pemerintah sektor kesehatan (X_2), pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur (X_3) terhadap IPM (Y) secara parsial atau sendiri-sendiri, dilakukan melalui pengamatan nilai signifikansi t pada tingkat α yang

digunakan (penelitian ini menggunakan tingkat α sebesar 5%).

Dari tabel hasil analisis regresi linier berganda pada Tabel di atas dapat kita lihat bahwa hasil uji t pada pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (X1) diperoleh signifikansi sebesar 0,156 yang nilainya di atas 0,05. Artinya variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (X1) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM Kalimantan Timur. Nilai signifikansi variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan (X2) sebesar 0,036 yang nilainya di bawah 0,05. Artinya variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap IPM Kalimantan Timur. Pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur (X3) seperti diperoleh signifikansi sebesar 0,362 yang nilainya di atas 0,05. Artinya variabel Belanja Pemerintah sektor infrastruktur secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM Kalimantan Timur.

Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel bebas secara simultan / bersama-sama terhadap variabel terikat. Hasil uji F dengan program SPSS versi.20.0 *for Windows* adalah sebagai berikut:

Tabel Hasil Uji F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	.004	3	.001	9.933	.010 ^b
Residual	.001	6	.000		
Total	.005	9			

Berdasarkan table output SPSS di atas diketahui bahwa nilai Sig. adalah $0,010 < 0,05$, maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima atau dengan kata lain Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (X1), Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan (X2) dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Infrastruktur (X3) secara simultan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y).

PEMBAHASAN

a. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Kaltim tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Indeks Pembangunan Manusia.

Hal ini mengindikasikan bahwa besarnya Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan yang dialokasikan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak digunakan untuk program-program yang tepat yang dapat

berpengaruh langsung terhadap peningkatan kualitas pembangunan manusia.

Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan pada Pemerintah Provinsi Kaltim belum dimaksimalkan untuk kegiatan pada sektor pendidikan secara efektif dan efisien, tetapi masih digunakan untuk membiayai belanja rutin seperti belanja pegawai, belanja barang dan belanja bunga dan bahkan ada indikasi penyimpangan anggaran pendidikan

Dalam konteks Kalimantan Timur BPS (2020) menyebutkan bahwa dalam kurun periode 2010-2019 harapan lama sekolah meningkat dari 11,87 tahun menjadi 13,69 tahun atau naik sebesar 1,82 tahun. Sementara rata-rata lama sekolah meningkat dari 8,56 tahun menjadi 9,70 tahun atau naik sebesar 1,14 tahun. Tetapi angka di atas tidak menunjukkan secara detail mengenai siswa yang tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali, serta anak yang terlalu awal untuk masuk sekolah

Menjadi permasalahan tersendiri ketika angka rata-rata lama sekolah meskipun mengalami kenaikan setiap tahunnya akan tetapi masih tidak sampai menyentuh target wajib belajar pemerintah selama 12 tahun. Jika kita lihat data di atas maka terjadi kesenjangan antara penduduk yang menyelesaikan pendidikan dan target wajib belajar selama 12 tahun. Artinya kesenjangannya mencapai 2,3 tahun. Sehingga jika kita lihat tren kenaikan selama 9 tahun terakhir hanya sebesar

0,91, berarti kenaikan rata-rata lama sekolah sebesar 0,114 per tahun. Maka untuk mencapai target itu diperlukan waktu selama 20 tahun lebih terhitung dari tahun 2020. Sehingga untuk mencapai tingkat IPM yang berklasifikasi *very high human development* itu masih sangat jauh.

Selama ini fasilitas pendidikan yang berkualitas hanya tersebar di kota-kota besar seperti Kota Samarinda, Kota Balikpapan dan Kota Bontang. Selain akses pendidikan yang menjadi permasalahan utamanya ialah rasio jumlah murid dan guru yang masih belum seimbang serta infrastruktur yang masih belum menunjang.

b. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pengeluaran Pemerintah sektor Kesehatan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini mengindikasikan bahwa besarnya Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan yang dialokasikan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur digunakan untuk program-program yang tepat yang dapat berpengaruh langsung terhadap peningkatan kualitas pembangunan manusia.

Hasil estimasi regresi ini sesuai dengan teori modal manusia oleh Selma J. Mushkin. Mushkin (1962) menjelaskan teorinya dalam *Journal of Politic Economy* dengan kajian yang mendalam tentang kesehatan. Dalam teorinya ditemukan bahwa di Amerika Serikat dalam kurun waktu 1900-1917

terdapat penurunan angka kematian yang signifikan. Mungkin dalam penelitiannya melihat program-program di bidang kesehatan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta dalam bentuk pencegahan dan pengobatan dapat mengurangi hal tersebut.

Peningkatan jumlah fasilitas kesehatan mampu menunjang keberhasilan program peningkatan IPM Kalimantan Timur. Selain itu anggaran kesehatan pada APBD Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2019 mencapai 1,26 triliun rupiah. meskipun mulai tahun 2011 seluruh masyarakat Indonesia tak terkecuali masyarakat Provinsi Kalimantan Timur diwajibkan untuk mengikuti program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh negara melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini tertuang dalam UU Nomor 24 tahun 2011 tentang jaminan sosial. Sehingga jika kita melihat dalam sisi penganggaran dalam fungsi kesehatan maka dapat dikatakan telah efektif.

c. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Infrastruktur terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui variabel pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Timur. Hasil Penelitian memberikan makna

bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur tidak mampu mempengaruhi IPM Provinsi Kalimantan Timur.

Problem pembangunan pada sektor-sektor yang berkaitan dengan layanan sosial kemasyarakatan di Provinsi Kalimantan Timur belum mendapatkan perhatian pemerintah secara langsung untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan IPM, harus dilakukan dengan membangun fasilitas yang berkualitas dan merata di bidang infrastruktur yang menunjang perekonomian seperti pasar, akses distribusi barang dan jasa berupa jalan, jembatan, pelabuhan bongkar muat barang, bandara dan lain-lain.

Program yang salah sasaran dan belum meratanya pembangunan di sektor infrastruktur di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur menghambat pertumbuhan IPM Provinsi Kalimantan Timur.

Selanjutnya terjadinya kegagalan pasar dalam penyediaan barang publik, sehingga pemerintah memiliki peranan penting dan harus campur tangan melalui kebijakan fiskal. Hal tersebut berkaitan dengan fungsi utama dari kebijakan fiskal, diantaranya: stabilitas keuangan, penyediaan barang publik dan redistribusi pendapatan (Waluyo, 2010).

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh

- positif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Timur.
2. Variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Timur.
 3. Variabel pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Timur.
 4. Variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

B. Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, terdapat beberapa hal yang disarankan oleh penulis, di antaranya:

1. Pemerintah seyogyanya dapat mensinergikan antara kewenangan pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota dalam bidang pendidikan. Besaran dana yang dialokasikan dalam penganggaran pendidikan sebaiknya bagaimana mempertimbangkan bagaimana penggunaan dana tersebut dapat dilakukan dengan bijak dan tepat sasaran agar dapat memperbaiki kualitas sumber daya manusia

sehingga lebih meningkatkan IPM di masa yang akan datang.

2. Pemerintah agar terus berupaya meningkatkan anggaran agar dapat mendongkrak pelayanan kesehatan yang lebih maksimal dan lebih merata sampai ke pelosok, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan serta upaya lain yang dipandang perlu seperti sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat kepada segenap lapisan masyarakat dari hulu sampai hilir.
3. Pengeluaran pemerintah di luar pengeluaran rutin dalam bentuk infrastruktur sebaiknya ditujukan untuk memicu atau bahkan meningkatkan sendi-sendi perekonomian di Kalimantan Timur. Dengan terpicunya sektor-sektor yang ada dan meningkatnya produksi pada semua sektor, maka akan meningkatkan pendapatan masyarakat yang dengan sendirinya akan mewujudkan kesejahteraan rakyat.
4. Pemerintah dalam upaya peningkatan IPM dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan melakukan pemetaan dan evaluasi anggaran pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang proposional, tepat guna, tepat sasaran, efektif dan efisien berdasarkan program-program prioritas yang berpihak kepada masyarakat, selalu aktif berkoordinasi dengan *stakeholder*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ala, H. M. 2016. Pengaruh Belanja Langsung Sektor Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan Pertanian Terhadap IPM (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Propinsi NTT). Wahana, Volume 18,(August 2015), pp. 163–174.
- Badan Pusat Statistik. 2020. Indeks Pembangunan Manusia 2019. Badan Pusat Statistik, 1, p. 127. doi: 10.1017/CBO9781107415324..
- Kuncoro, M. 2010. Dasar-dasar ekonomikapembangunan (Edisi Kelima ed.). Yogyakarta:
- Mirza, D. S. 2015. Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Jawa Tengah. Jejak, 4(3), pp. 276–284.
- Mushkin, S. J. 1962. Health As An Investment. Journal of Political Economy, 70(5),p. part 2.
- Todaro, M. P.& Smith, S. C. 2011. Economic Development. Wahington DC: George Washington University.
- UNDP .2011. *Human Development Report* 2011. Human Development, 21, pp: 45–68.
- Waluyo, A. 2010. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Peningkatan Pembangunan Manusia dan Pengurangan Kemiskinan. Depok: Universitas Indonesia.